

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A'an Efebdi, Diah Ochtorina Susanti, 2022, *Logika & Argumentasi Hukum*, Kencana, Jakarta.

Achmad Ali, WiWie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta.

Adami Chazawi, 2018, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, MNC Publishing, Malang.

Ahmad Ramli, 2004, *Cyber Law Dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.

Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2019, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2021, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung.

Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.

Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim, 2019, *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Kosntitusi*, Setara Press, Malang.

Artedjo Alkostar, 2015, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta.

Aruan Sakidjo & Bambang Poemomo, 1990, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Azwar Syaifudin, 2005, *Metode Penelitian, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.

- Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Badriyah Khaleed, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Medpress Digital, Yogyakarta.
- Bahir Mukhammad, 2022, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jejak Pustaka, Yogyakarta.
- Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UUD*, PT Gramedia, Jakarta.
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Eddy O. S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Hukum Pidana*, Universitas Terbuka, Banten.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- \_\_\_\_\_, 2020, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Edmon Makarim, 2010, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Efa Laela Fakhirah, 2017, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Emma Dewi dan Firdanefi, 2014, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dinamika dan Perkembangan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- F Sugeng Istarto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.
- Fajlurrahman Jurdi, 2017, *Logika Hukum*, Kencana, Yogyakarta.
- Franzmagni Suseno, 1979, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius Jakarta
- H. Masyhudi, & H. Sigid Suseno, 2021, *Sidang Virtual*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

- H.L.A. Hart, 2021, *Fondasi Sistem Hukum; Seri Konsep Hukum*, Nusamedia, New York.
- H.M. Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Keith E. Whittington, R. Daniel Kelemen, dkk, 2021, *Hukum dan Regulasi; Handbook Hukum dan Politik*, Nusamedia, The Oxford.
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana, (Penyelidikan & Penyidikan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya)* PT. Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M Hadin Muhjad dan Nunung Nursawardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Arif Setiawan, Nurjihad dkk, 2019, *Menggugat Keyakinan Hakim Tanpa Alat Bukti*, UII Press, Yogyakarta.
- M. Husnu Abadi & Wira Hajri, *Pemuatan Norma Hukum Yang Telah Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- M. Husnul Abadi & Wira Atma Hajri, 2017, *Pemuatan Norma Hukum Yang Telah Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika.

- Marcus Priyo Gunarto, Wahyu Sudrajat, 2018, *Dekonstruksi Putusan Bebas dan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Maria S. W Sumardjono, 2001, *Panduan Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Maruarar Siahan, 2022, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dan Pembangunan*, Penerbit Alumni Bandung.
- Moeljatno, 1995, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Mukri Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munsaroh, 2019, *Mengenal Hukum*, Loka Aksara, Tangerang.
- Peter Mahmud Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta.
- R. Atang Ranoemihardja, 1976, *Hukum Acara Pidana*, Transito, Bandung.
- R. Soeroso, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahman Amin, 2020, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Deepublish, Yogyakarta.



Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rohendra Fathammubina, 2020, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Alqaprint Jatinanggor, Bandung.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

S.M. Amin, 1981, *Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sigid Suseno, 2012, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soeparmono, 2016, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Merokusumo, 2015, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Suhartoyo, 2019, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian*, Raja Wali Pers, Depok.

Sutrisno Hadi, 1987, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Zainal Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 9,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81)
- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor  
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4720)
- Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  
Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5164)
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  
Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5406)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432)

Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266)

### C. Karya Ilmiah dan Pidato

Abdul Halim Daniel, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Alat Bukti Elektronik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/Puu-Xv/2016", *Lex Et Societatis* Volume X Issue 2, April - Juni, 2022.

Ahmad Subandi, 2021, *Kekuatan Pembuktian (Bewijskracht) Terhadap Pengajuan Alat Bukti Keterangan Ahli Disertai Bukti Tertulis Hasil Audit Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Akmal Muhajir, 2016, "Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Akses Ilegal", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Daniel Pradipta Firdaus, 2012, "Kekuatan Pembuktian Bukti Elektronik Yang Diperoleh Berdasarkan Hasil Rekaman Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan 11/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst", *Tesis* Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Dimas Aria Putra Justicia, 2020, "Eksistensi Alat Bukti Elektronik Hasil Pemulihan Data Dalam Pembuktian Perkara Pidana", *Tesis*, Magister Hukum Litigasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Eddy O.S Hiariej, 2012, *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

I Nungah Ariana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan alat Bukti Elektronik Berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016" *Unes Law Review*, Vol 5 Issue 1 September 2022.

Made Sugi Hartono, Ni Putu Rai Yulianti, "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana", *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6 No 1, Februari 2020.



Nasional Institute of Justice, *Electronic crime scene investigation guide: a guide for first responders*, "United States Departement of Justice Office Of Justice, 2001.

Nur Laili Isma Dan Arima Koyimatur, 2014, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana", *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2014.

Ofori AY, "Digital Forensik Investigation Jurisprudence: Issues Of Admissibility Of Digital Evidence, *Journal Of Forensic, Legal & Investigative Sciences*, Vol. 6, No. 1, 2020.

Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 465/Pid.Sus/2017/PN. dan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Muari No. 91/Pid.Sus/2018/PN. Mrj.

Veibe V. Sumilat, "Eksistensi Penemuan Hukum Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid.B/2014/Pn.Bgl Tentang Tindak Pidana Perkosaan)" *Lex Crimen* Vol. X/No. 3/Apr/2021.

Yohanes Suhardin, "Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009.

#### D. Internet

Andi Saputra, "Belajar Dari Kasus Chatting Istri Di FB Yang Dipidanakan Suaminya", *Detik News.com*, Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-3005343/belajar-dari-kasuschatting-istri-di-fb-yangdipidanakan-suaminya>, pada tanggal 4 Februari 2023.

Dimas Hutomo, "Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana", *Hukum Online*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c4ac8398c012/keabsahan-alat-buktielektronik-dalam-hukum-acara-pidana>, pada tanggal 4 Februari 2023.

Diperoleh dari akun Youtube Muhammad Fatahillah Akbar dalam perkuliahan daring diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=wu4NnkL-CU&t=473s> tanggal 3 November 2020.

Eddy O.S Hiariej, "Beberapa Catatan RUU KUHAP Dalam Hubungannya Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", diakses melalui <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Eddy%2520OS%2520HiariejBeberapa%2520Catatan%2520RUU%2520KUHAP%2520d>



*alam%2520Hubungannya%2520dengan%2520Pemberantasan%2520Tindak%2520Pidana%2520Korupsi.pdf*, tanggal 10 Februari 2023.

Hukum Online, “Kata ini sebagai pengganggu dalam KUHAP” diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/kata-ini-yang-mengganggu-dalam-kuhap-lt5739b688956b2/> tanggal 11 Februari 2023.

KPMI FH UGM, *BAC Diskursus Perubahan UU KPK Melemahkan atau Memperkuat?*, diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=yYGfcO0Jy7I>, tanggal 10 Februari 2023.

Theresia Octaviani Manurung, “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana Di Indonesia”, diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/79114/44713> Pada tanggal 12 Februari 2023.

Vento Saudale, “18 Kasus Polda Jabar Terpecahkan Berkat CCTV”, Berita satu.com, Diakses melalui <https://www.beritasatu.com/nasional/460412-18-kasus-poldajabar-terpecahkan-berkatcctv.html>, pada tanggal 4 Februari 2023.